Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Manajemen Konflik: Analisis Konflik Tanah di Desa Surokonto Wetan (Revised)

Nihayatul Husna

Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan tentang konflik yang bersumber dari tanah baik itu konflik vertikal maupun horizontal antara masyarakat dengan pihak swasta atau bahkan pemerintah yang menyangkut tanah-tanah perkebunan terus bergulir dan tidak kunjung selesai. Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik sama-sama mengakui paling berhak atas tanah yang menjadi konflik. Jika sengketa atau konflik tanah tidak mendapatkan perhatian khusus dan tidak dicarikan pola-pola penyelesaiannya, maka konflik vertikal maupun konflik horizontal tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Harapan atas kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah hanya menjadi harapan dan impian belaka.

Kata Kunci: Konflik, Manajemen Konflik, Konflik Tanah

Latar Belakang

Dalam negara republik Indonesia yang susunan kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal perekonomiannya, yang masih bercorak agraris, bumi dan juga air. Sumber alam termasuk karunia Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan setiap makhluk hidup selain itu, juga mempunyai fungsi untuk membangun masyarakat yang adil serta makmur sebagai apa yang telah dicita-citakan. Salah satu karunia Tuhan yang paling berharga adalah Tanah, karena tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk melakukan rutinitasnya. Seperti untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan masyarakat Indonesia banyak yang menggantungkan kehidupannya dari tanah, ini disebabkan karena tanah juga sebagai modal yang utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas jual beli atau perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan konsekuensi bahwa hubungan antara manusia dengan tanah mutlak untuk diperlukan adanya penataan dan peraturan yang lebih detail khususnya berkaitan dengan penguasaan, peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan. Pembangunan pada sektor pertanian disamping untuk mencapai dan memperbesar produksi pertanian juga untuk meningkatkan taraf hidup para petani, hal ini dikarenakan petani merupakan sokoguru pembangunan nasional. Petani adalah mereka yang pencahariannya mengusahakan tanah pertanian, akan tetapi pada kenyataannya dalam pasang surut petani sering kali menjadi kambing hitam yang terpojok antara kenyataan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, seperti kebijakan dari pejabat yang tidak populis.

Oleh karena itu, petani penggarap dalam kenyataannya bukanlah pemilik tanah, mereka yang secara turun temurun mengusahakan tanah perladangan sebagai tumpuan hidup bagi anak cucunya, bahwa tanpa disadari oleh masyarakat petani ternyata tanah yang selama ini diusahakan tersebut adalah termasuk kawasan hutan lindung atau milik pihak lain, sedangkan petani merasa sudah mendarah daging dengan lingkungan tersebut. Perlu adanya suatu pengaturan hukum pertanian pertanahan yang memberikan kepastian hukum tentang

Conflict Management Unnes Student

Working Paper Series 2017

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat melindungi hak-hak masyarakat setempat khususnya petani penggarap, melalui peraturan perundang-undangan yang melihat adat istiadat dan masyarakat hukum adat istiadat.

Walaupun tanah di negara-negara agraris seperti Indonesia merupakan suatu kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Disatu pihak terdapat individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan, namun dilain pihak terdapat kelompok manusia yang sama sekali tidak memiliki tanah. Kepincangan atas kepemilikan tanah inilah yang membuat seringkali permasalahan tanah di negara Indonesia menjadi salah satu sumber utama.

Sejak zaman nenek moyang kita hingga sekarang masalah tanah selalu aktual untuk dibicarakan, selain karena jumlahnya yang sangat terbatas dan juga tidak bertambah, sedangkan orang yang membutuhkan tanah terus meningkat. Oleh sebab itu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia permasalahan tanah sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “tanah, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, untuk kemakmuran rakyat”. Maka atas dasar ketentuan tersebut negara mempunyai kewenangan untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang sebelumnya telah ditentukan.

UUPA pasal 2 menegaskan mengenai hak menguasai dari negara yang berwenang untuk:

1. Mengatur dan menjalankan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hal tersebut dimaksudkan agar tanah dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Dan diperjelas dengan adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari adanya UUPA tersebut yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Dengan adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah akan memberikan kejelasan terhadap kepemilikan tanah, batas-batas tanah dan penguasaan tanah. Dalam hal ini hukum mempunyai peran yang sangat penting untuk memutuskan, apakah penguasaan atas tanah akan dapat memperoleh perlindungan dari hukum atau tidak. Maka dari itu, penguasaan tersebut bersifat faktual maka ukuran untuk mendapatkan perlindungan hukum pun juga bersifat faktual pula. Sehingga perlu adanya kepemilikan ataupun penguasaan yang secara jelas atau clean and clear untuk tujuan memperoleh pengakuan, perlindungan sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai perlindungan bila terjadi konflik atau masalah dari orang lain yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan batas-batas tanah yang dimilikinya.

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil dan efisien. Dalam pengolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif dan fungsional.

Pembahasan

Konflik pertanahan memang sudah terjadi dari sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang ini. Jika pada zaman penjajahan konflik pertanahan terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara penjajah dan pihak yang dijajah sehingga berimbas pada konflik hukum yaitu dengan berlakunya dualisme hukum pertanahan. Akan tetapi di era kemerdekaan dan reformasi sekarang ini, konflik tanah muncul disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan perorangan dan pertentangan kepentingan kelompok. Selain itu juga karena adanya pertentangan kepentingan umum dengan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Nurdjana konflik didefinisikan sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda ataupun berlawanan antara satu pihak dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya itu saling mengganggu satu sama lain.

Terdapat kekeliruan pemerintahan orde lama dan orde baru. Orde lama menjadikan politik sebagai kekuasaan, sedangkan orde baru menjadikan perekonomian sebagai kekuasaan, yang pada intinya dari keduanya tidak memberikan rasa keadilan kepada rakyat. Orde lama mengabaikan perekonomian karena terlalu asik dalam mengatur kekuasaannya didalam politik, dan orde baru yang semata-mata hanya melaksanakan pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk keuntungan segelintir orang yang bermain didalamnya. Sehingga orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin.

Dalam bidang pertanahan kebijakan pemerintahan orde baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, para kapitalis yang mempunyai modal besar memiliki kekuasaan untuk memutar sistem produksi, sehingga kaum modal dapat mengambil tanah yang dimiliki oleh rakyat. Pada titik inilah rakyat merasakan adanya ketidakadilan karena pembangunan tersebut mengutamakan pertumbuhan ekonomi maka yang diutamakan adalah golongan ekonomi kuat. Ketidakadilan yang dirasakan oleh warga sering kali diabaikan, dengan seperti itu dalam memperoleh tanah milik rakyat dilakukan dengan segala cara bahkan cara yang melanggar hukum negara sekalipun. Tanah harus diperoleh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanah serta imbalannya. Konflik pada masa orde baru terjadi dalam konteks perebutan sumberdaya, yang terjadi bukanlah dikarenakan kekurangan sumber daya, namun perebutan sumber daya ini dilakukan secara besar-besaran oleh pemodal dengan tujuan untuk menguasai sumber daya yang sebelumnya telah dikuasai oleh rakyat. Dan juga pada masa orde baru terdapat konflik tanah yang sifatnya memaksa terhadap rakyat kecil. Ada pula konflik yang sifatnya mengambang, ketika petani tidak mempunyai kaitan dengan elemen yang diatasnya, dan tidak mempunyai aliansi kemanapun, maka posisi petani tersebut sangatlah lemah. Konflik merupakan aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari serta ekspresi heterogenitas yang di timbulkan oleh perubahan sosial yang di wariskan. Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, dianggap momok yang menakutkan dalam kehidupan berorganisasi. Namun konflik adalah suatu hal yang harus dipecahkan, memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya secara bijak tanpa harus merugikan orang lain atau merasa orang lain tersebut merasa adanya kriminalitas.

Kepastian hukum atas hak-hak tanah khususnya mengenai kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta luasnya. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang telah menjadi haknya dan ini merupakan kewenangan umum

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

dari isi hak atas tanah tersebut dengan kewenangan yang ada batasnya. pemakaian tanah terbatas untuk dua tujuan yaitu untuk diusahakan misalnya pertanian, pertambangan dan perikanan dan dipergunakan sebagai tempat untuk membangun sesuatu seperti bangunan gedung, pabrik, rumah dll. Selain berisi wewenang, hak atas tanah juga berisi tentang batasan dan larangan bagi setiap pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang telah menjadi haknya mengenai apa yang diperbolehkan, apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang untuk dibuat oleh si pemilik hak tersebut.

Konflik yang bersumber dari tanah baik itu konflik vertikal maupun horizontal antara masyarakat dengan pihak swasta atau bahkan pemerintah yang menyangkut tanah-tanah perkebunan terus bergulir dan tidak kunjung selesai. Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik sama-sama mengakui paling berhak atas tanah yang menjadi konflik. Jika sengketa atau konflik tanah tidak mendapatkan perhatian khusus dan tidak dicari pola-pola penyelesaiannya, maka konflik vertikal maupun konflik horizontal tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Harapan atas kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah hanya menjadi harapan dan impian belaka.

Teori konflik menurut Karl Marx muncul sebagai bentuk reaksi atas suburnya suatu teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pemikiran Karl Marx mengenai teori konflik melihat masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok dan kelas sosial. Disisi lain konflik masyarakat juga dikuasai oleh sebagian kelompok atau individu yang mempunyai kekuasaan dominan. Karl Marx memandang pendakatan konflik dipandang menjadi dua dan Karl Marx memandang masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi, yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis adalah kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi yang dalam hal ini adalah perusahaan sebagai modal usaha. Sedangkan kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi sehingga dalam pemenuhan akan kebutuhan ekonominya tidak lain hanyalah membuang tenaganya. Konflik antar kelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal yaitu konflik antar kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Konflik ini terjadi karena ada kepentingan yang berbeda antar dua golongan atau kelas sosial yang ada.

Tanah sebagai Konflik

Keberadaan tanah yang sangat terbatas ini tidak diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya semakin pesat dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan tanah menjadi sesuatu yang paling dicari masyarakat, ataupun kelompok tertentu, khususnya tanah yang memiliki geografis yang sangat menguntungkan, sehingga hal tersebut dapat memunculkan konflik, persaingan-persaingan dengan tujuan untuk memperoleh tanah yang menurutnya sangat menguntungkan tersebut. Selain untuk penanaman investasi bagi para pemilik modal, tanah juga menjadi salah satu faktor timbulnya sengketa dan juga konflik dari bidang pertanahan baik mengenai status kepemilikannya, pengusahanya, maupun administrasi dari pertanahan. Seperti yang kita tahu, konflik pertanahan tidak pernah surut, artinya konflik ini sering timbul dalam masyarakat, bahkan konflik ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan adanya dinamika perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Perubahan pola pemikiran dari masyarakat tentang pentingnya tanah sebagai kehidupan dasar dalam kehidupan, sering menyebabkan terjadinya konflik di Indonesia. Konflik sumber daya alam menyita perhatian publik mulai dari pemerintah parlemen hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta lembaga swadaya masyarakat.

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Secara istilah konflik berasal dari bahasa latin yakni configure yang berarti saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak dengan mengakibatkan, menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang dapat terjadi baik antara individu, maupun antar kelompok masyarakat. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi. Perusahaan dan dalam sistem sosial yang kecil yang bernama keluarga dan pertemanan, karena konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir didalam kehidupan sosial artinya konflik akan selalu ada dalam ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok maupun individu dalam masyarakat tidak selalu sama, bahkan dalam banyak hal yang saling bertentangan antara satu sama lain.

Masyarakat sendiri merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa terus menerus akan berlangsung, oleh sebab itu konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi disetiap kehidupan sosial masyarakat. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Konflik sosial adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lainnya didalam masyarakat, dan ditandai dengan adanya sikap yang saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik didalam dirinya, karena konflik merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat. Selain itu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain. menurut teori konflik inersionisme simbolik bahwa konflik bahwa konflik muncul dikarenakan adanya perbedaan atas makna objek.

Penyelesaian konflik pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan masih terjalin dengan erat, maka biasanya penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluargaan. Biasanya penyelesaian konflik pada masyarakat yang masih tradisional mengikut sertakan hukum-hukum yang ada pada wilayah tersebut. Sedangkan, konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat modern dimana relasi sosial mereka lebih individualistik cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian konflik yang mengacu pada hukum negara. Salah satu konflik yang cukup kuat adalah konflik tanah.

Konflik tanah di Desa Surokonto Wetan, Kendal

Konflik tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dengan beragam bentuk dan penyebabnya. Konflik tanah menjadi sebuah program yang prioritas, penyelesaian dari kasus-kasus konflik tanah ini menjadi perhatian seluruh jajaran. Setelah Indonesia merdeka, ternyata tanah masih menyimpan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pada hakekatnya hukum tidak berada dalam ruang yang hampa tetapi hukum mengakar pada sistem politik yang berlaku. Dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat untuk menduduki bahkan menjarah tanah milik pihak lain dengan berbagai alasan, misalnya pemilik tanah tidak memberikan kontribusi masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya melalui hasil pertanian dari lahan tersebut yang telah digarapnya.

Salah satu permasalahan yang menimbulkan di Indonesia adalah mengenai Hak Guna Usaha (HGU). Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan tanah yang telah dikuasai oleh HGU areal tanah yang luas. Akan tetapi, penguasaan tanah dengan areal yang sangat luas oleh pihak-pihak tertentu, termasuk tanah perkebunan milik pemerintah, dan diketahui jika tanah tersebut mempunyai asal usul yang pada saat masa penjajahan diperoleh dengan cara merampas tanah milik rakyat, tentu

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

pernyataan tersebut dapat membuat ketidakadilan yang akan dirasakan oleh rakyat setempat yang sangat dirugikan akan hal tersebut. Hal inilah yang akan dapat menjadikan awal pemicu timbulnya konflik HGU. Permasalahan atau konflik yang sering terjadi mengenai HGU adalah adanya konflik pertanahan yang timbul diantara pemegang hak atas tanah dan masyarakat sekitar yang mengaku sebagai penggarap, antara penggarap dengan penggarap, bahkan antara penggarap dengan Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan lain sebagainya. Hak guna usaha hanya dapat diberikan untuk keperluan yang memerlukan tanah dengan luas minimum 5 ha. Selain itu HGU dapat beralih status yang dialihkan oleh orang lain dan dapat sebagai objek jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Prinsip tanah yang dapat diberikan oleh HGU adalah hanya tanah negara, dan apabila tanah tersebut dikuasai dengan hak tertentu sebelumnya, maka tanah tersebut harus lebih dulu dilepaskan oleh si pemilik tanah baik melalui penetapan dari pemerintah maupun dengan cara sukarela, hingga status dari tanah tersebut menjadi tanah milik negara baru dapat diberikan oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu ciri HGU adalah adanya penetapan luas HGU, baik dari batasan luas minimal dan maksimal, luas minimal pemberian HGU adalah 5 Ha, sedangkan HGU yang diberikan kepada perorangan maksimal adalah 25 Ha. Pemberian HGU kepada badan hukum, batas luasnya ditetapkan dengan mempertimbangkan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan luas yang diperlukan pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna dibidang yang bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan Konflik yang terjadi antar warga surokonto wetan, desa pageruyung di daerah Kendal dengan PT sumur pitu. Konflik yang terjadi di kabupaten kendal disebabkan adanya pengakuan dari pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai penggarap tanah yang sah atas tanah. Konflik ini bermula karena kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan dari warga masyarakat mengenai status tanah yang selama bertahun-tahun mereka garap dan tanah yang telah menjadi sumber perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, warga hanya mengetahui adanya alih status tanah milik perhutani KPH Kendal, sehingga lahan tanah tersebut sudah biasa digarap oleh warga sekitar karena yang merupakan tanah negara.

Sebelumnya, Biro Rekonstruksi Nasional membeli lahan tersebut pada tanggal 23 Desember 1952, dan telah tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 45 tanggal 23 Desember 1952 yang ditandatangani RM Soeprapto selaku notaris. Kemudian pada tahun 1956 kepemilikan tanah tersebut beralih status yaitu tanah menjadi milik komudik tingkat Jawa Tengah, dan badan hukum pada tahun tersebut NV. Sekecer/Wringinsari pun dibentuk oleh pribadi-pribadi atas nama Veteran guna mengelola lahan tersebut, akan tetapi tak lama kepemilikan tersebut beralih terjadi tragedi tepatnya pada tanggal 30 September 1965, sehingga lahan tersebut kembali dikuasai secara paksa oleh negara dengan terbitnya SK Kep-PPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966. Hingga pengalihan kepemilikan tanah tersebut beralih pada PT. Sumurpitu yang kemudian saham tanah tersebut dibeli oleh PT. Semen Indonesia dengan luasan 400 hektar seharga Rp 75 miliar. Tahun 2013, sebesar 125,53 hektar lahan tersebut ditunjuk sebagai lahan pengganti dalam rangka tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Semen Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013.

Sebelum berganti status, tanah di daerah kendal tersebut telah digarap oleh warga sekitar, dan mereka telah membuat perjanjian dengan cara berbagi hasil dengan pihak dari PT. Sumurpitu. Akan tetapi, walaupun sudah ada perjanjian yang telah disepakati antar keduanya, pihak sumurpitu kerap kali menyewakan lahan yang telah digarap oleh warga

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

sekitar dengan orang pihak ketiga tanpa sepengetahuan warga tersebut. Sehingga hal tersebut membuat warga surokonto merasa dibohongi oleh pihak dari sumurpitu karena telah ingkar terhadap perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama. Hingga pada tanggal 12 Maret 2012 warga diberitahu tentang adanya surat yang berisi penawaran bersama saham penjualan tanah PT. Sumurpitu Wringinsari. Tentu saja hal tersebut membuat warga merasa semakin dibohongi karena tidak ada informasi yang diberikan kepada warga mengenai adanya penjualan tanah yang saat itu masih menjadi tumpuan perekonomian warga desa surokonto wetan kabupaten Kendal. Warga yang biasa menggarap lahan tersebut tidak mengetahui akan adanya perubahan status yang semula tanah milik negara berubah status. Sebagai pembeli tanah pemerintah memang berbeda dengan pembeli tanah yang biasa, karena pemerintah mempunyai kekuatan memaksakan kehendaknya baik melalui aparat maupun hukum yang menyatakan bahwa negara adalah pemilik semua tanah yang ada dinegeri ini dan dengan demikian berhak untuk membebaskan tanah yang dimiliki oleh setiap warganya untuk kepentingan umum

Desa yang berada di bilangan Kendal selatan ini mayoritas penduduknya bekerja disektor perkebunan Selebihnya, bekerja sebagai buruh tani, peternak, dan pedagang. Bila ditarik secara kronologis, masyarakat Desa Surokonto Wetan sudah menggarap lahan perkebunan sekitar desa tersebut semenjak tahun 1952, kemudian berlanjut kembali pada tahun 1972 hingga saat ini.

Semenjak 1952 hingga saat ini, lahan tersebut sudah berpindah tangan hak pengelolaannya (hak guna usaha) dari satu perusahaan ke perusahaan lain, namun sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 6 disebutkan bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Dengan ketentuan ini, maka siapa pun yang memperoleh hak atas tanah apalagi tanah milik negara, harus memberikan timbal balik kepada masyarakat sekitar lahan demi adanya distribusi perekonomian agar tidak timpang.

Selain itu, dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) juga disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dengan begitu, kekayaan alam yang memiliki potensi banyak sudah semestinya dikawal oleh peraturan hukum dan aparat yang pro-rakyat dan siap bersedia memberikan kemakmuran bagi rakyat. Namun tanpa sepengetahuan warga, PT. Sumurpitu Wringinsari di tahun 2012 menjual lahan tersebut kepada pihak ketiga, yakni PT. Semen Indonesia-Rembang. Pada tahun 2013 lahan tersebut dijadikan-ditransaksikan menjadi lahan pengganti bagi lahan PT. Perhutani yang terkena garapan pabrik semen di Rembang. Sekali lagi, transaksi ini terjadi tanpa sepengetahuan warga.

Adanya kurangnya informasi atau sosialisasi, transparansi dari pihak PT. Sumur inilah yang menimbulkan kekecewaan terhadap warga sekitar surokonto yang merasa sangat dirugikan akan adanya keputusan sepihak tersebut, dan warga faktanya setelah adanya perpindahan tersebut tidak mengetahui telah adanya SK, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya dua regulasi tukar-menukar lahan tersebut, tanah negara yang mulanya “dibeli” oleh PT. Semen Indonesia dari PT. Sumurpitu Wringinsari tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik PT. Perhutani KPH. Kab. Kendal.

Dalam kasus konflik ini terdapat aktor informal yakni kyai azis beserta dua temannya Mudjiyono dan sutrisno yang merangkul warga masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menyelesaikan konflik tersebut dengan melalui jalan silaturahmi kepada pihak-pihak pejabat dan instansi yang terkait, karena warga menduga terdapat aktor-aktor tertentu

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini diperjelas dengan sikap dari instansi pemerintahan yang merayu warga masyarakat desa surokonto wetan untuk mengalah dan tidak melanjutkan kasus tersebut keranah yang lebih tinggi. Karena sebelumnya, selama bertahun-tahun warga menggarap lahan tersebut, dan kyai azis lah yang merancang mengenai pembagian garapan lahan sebagai mata pencaharian warga surokonto wetan sehingga warga tersebut dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Nur azis mempunyai jabatan sebagai kepala paguyuban petani Kendal yang mengontrol pembagian kinerja tempat lahan pertanian untuk dimanfaatkan warga masyarakat sekitar. Tanah yang memiliki luas sekitar 127,821 Ha dimanfaatkan oleh sekitar 455 kepala keluarga yang tinggal disekitar kawasan hutan desa surokonto wetan, desa surokonto kulon, desa desa pager gunung dan desa sidomukti awalnya konflik tersebut tidaklah begitu intens.

Akan tetapi pada sekitar tahun 2014-2015 persoalan tersebut berubah, ini berawal dari adanya program penanaman jati dan penyampaian kepada warga masyarakat sekitar bahwa lokasi lahan tersebut adalah menjadi bagian dari lahan pengganti PT. Semen Indonesia kepada perum perhutani yang berada di rembang. Oleh karena itu, masalah konflik ini erat kaitanya dengan pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di daerah rembang. Pada akhir 2015 perum perhutani kabupaten kendal melakukan sosialisasi pada warga masyarakat sekitar dan mengatakan bahwa areal perkebunan PT. Sumur pitu telah menjadi kawasan hutan kembali. Proses tersebut terjadi karena kawasan menjadi bagian dari lahan pengganti yang dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia, semenjak itulah praktik penegak hukum semakin masif hingga

Sikap yang ditunjukkan oleh PT. Sumurpitu tersebut membuat warga merasa kecewa dan yakin jika terdapat permainan yang terselubung antar aktor formal maupun informal yang bermain didalamnya. Namun tanpa di sangka-sangka langkah yang dilakukan kyai azis beserta rekannya dianggap oleh kalangan tertentu bahwa hal tersebut telah menyalahi hukum, dengan dasar laporan tuduhan perkara dugaan tindak pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. yang patut diketahui oleh Pemerintah dan Masyarakat secara luas, bahwa sesungguhnya masyarakat Surokonto Wetan semenjak era penjajahan Belanda-lah yang merawat lahan tersebut. Bahwa memang benar, sudah ada berbagai perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan tersebut melalui hak guna usaha atau menyewa lahan, namun semuanya tidak mengelola lahan secara semestinya. Bahkan PT.Sumurpitu Wringinsari yang secara de jure memiliki hak pengelolaan melalui hak guna usaha semenjak 1972 hingga 2022, namun dalam rentang panjang waktu tersebut-pun tidak mengelola lahan sebagaimana semestinya. Penanaman komoditas perkebunan yang dikelola PT.Sumurpitu Wringinsari hanya berjalan bebrapa waktu saja dan tidak berkelanjutan.

Laporan tersebut tentu bertentangan dengan fakta yang terjadi dilapangan, dan ketiga petani tersebut telah menjadi tersangka dalam kasus yang menjeratnya dengan dijatuhi hukuman 8 tahun dengan denda yang dijatuhkan sebesar 10 Milyar. Menurut nur azis SK Menhut yang terkait dengan penetapan kawasan hutan di daerah surokonto wetan tidak sah karena tidak clean and clear. Sehingga ia merasa ada kecurangan atas kasus pertanahan ini. Dalam kasusnya nur azis dilaporkan oleh Rovi Tri Kuncoro selaku ADM Perum Perhutani KPH Kendal.

Dari hasil peradilan tersebut tentu menimbulkan kriminalitas terhadap petani yang dilakukan oleh pejabat dan instansi-instansi yang bermain didalamnya, warga yang telah puluhan tahun mengelola dan memanfaatkan lahan kini telah menyandang status sebagai terpidana. Konflik yang meregikan warga surokonto wetan hingga saat ini masih berlanjut

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

dipengadilan. Karena terdapat ketidakadilan yang terjadi didalamnya, pada dasarnya proses akumulasi dalam wilayah pertanian, di tengah serangan kapitalisme, juga terus mendapat perlawanan dari Rakyat. Kasus perebutan tanah, klaim atas penguasaan tanah oleh perusahaan, militer dan negara selalu berhadapan dengan kaum buruh-tani. Upaya demi upaya dilakukan oleh warga masyarakat sekitar untuk membebaskan ketiga petani tersebut melalui jalur silaturahmi keberbagai pejabat dan instansi yang terkait sudah dilakukan, namun hasilnya masih nihil. Tanpa disangka-sangka langkah yang ditempuh oleh sang kyai bersama warga justru dianggap tindakan yang melawan hukum dengan dasar tuduhan yang tidak dibenarkan, berbeda antara tuduhan yang dijatuhkan dan realita yang ada dilapangan. Padahal mereka hanya ingin membantu untuk memperjuangkan atas hak-hak mereka.

Adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap, padahal jika diamati lebih jelas permasalahan tanah ini seharusnya idaklah menjadi suatu konflik yang berkepanjangan hingga membuat ketidakadilan yang dirasakan oleh warga terutama tiga petani yang saat ini menjadi tersangka, jika status dari lahan jelas clean and clear. Karena dalam proses tukar giling lahan tersebut idak melibakan warga, padahal saat itu warga masih menempati kawasan lahan tersebut sebagai mata pencaharian dengan cara bertani.

Konflik ini terus berlanjut hingga warga surokonto wetan balik mengadukan pihak terkait ke KPK, karena mereka menganggap adanya dugaan korupsi yang menyangkut PT. Sumurpitu kepada PT. Semen Indonesia, dan menduga terdapat tindakan pidana korupsi yang mungkin terjadi di ranah pemerintahan, provinsi dan juga tingkat desa. warga sekitar merasa bahwa mereka masih memiliki hak atas tanah tersebut karena menurutnya tanah tersebut adalah tanah negara. Namun laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPK, karena tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang memperlihatkan dan menjelaskan adanya kasus tindak pidana korupsi yang meresangkakan oleh pihak terkait tersebut. Kasus konflik pertanahan tersebut berakhir dimeja persidangan yang akhirnya menetapkan tiga petani menjadi tersangka dan terancam hukuman 8 tahun penjara dengan denda 10 Milyar.

Konflik ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, komunikasi yang buruk ini merupakan sebab dari timbulnya konflik. Pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi. Seharusnya konflik diatas dapat diselesaikan dengan cara adanya rekonsiliasi konflik. Rekonsiliasi adalah menyelesaikan konflik dengan bergabung kembali, berbaik kembali, sependapat kembali, memulihkan konflik yang telah terjadi dan mengikat dengan rasa kepercayaan. Rekonsiliasi merupakan proses dari penyelesaian konflik untuk memulihkan kembali keadaan-keadaan yang berakibat terhadap pertikaian. Penyelesaian konflik yang melibatkan warga surokonto wetan ini berakhir di meja peradilan dengan menetapkan tiga orang petani sebagai tersangka dan di hukum 8 tahun penjara dengan denda maksimal 10 Milyar.

Transisi politik otonomi yang memberikan peluang besar bagi daerah justru membuat kebingungan struktural lembaga birokrasi yang bertanggung jawab atas penanganan sengketa pertanahan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004, seharusnya dapat berperan besar terhadap masalah tanah. Akan tetapi dari banyaknya kasus tanah pemda kurang bertanggung jawab atas apa yang semestinya dilakukan, mereka cenderung berdiam diri. Mengatasi dan menyelesaikan konflik bukanlah suatu hal yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diselesaikan, tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan dari pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul.

Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017

Konflik tidak selamanya berkontraksi buruk, tapi bisa menjadi sumber sebagai pengalaman yang positif. Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, akan tetapi konflik dapat memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan antara pihak-pihak yang terlibat. Pelajaran yang dapat diambil itu berupa bagaimana cara untuk menghindari konflik yang sama agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu konflik tersebut terjadi kembali.

Kesimpulan

Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil dan efisien. Dalam pengolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif dan fungsional.

Konflik yang terjadi antar warga surokonto wetan, desa pageruyung di daerah Kendal dengan PT sumur pitu. Konflik yang terjadi dikkabupaten Kendal disebabkan adanya pengakuan dari pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai penggarap tanah yang sah atas tanah. Dan konflik ini diselesaikan lewat jalur pengadilan dengan menetapkan tiga orang petani surokonto wetan menjadi tersangka dengan tuduhan menyuruh, mengorganisir atau menggerakkan, pemufakatan, pembalakan liar.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2001. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arumsari, N., Septina, W. E., Luthfi, M., & Rizki, N. K. A. (2017). KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DALAM MENDORONG INOVASI PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS TIGA DESA DI LERENG GUNUNG UNGARAN, JAWA TENGAH. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 87-100.
- Aprianto, Tri Candra. 2009. Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek, Jember. Vol 13, No1. 71-90.
- Handoyo, Eko. 2013. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Marzuki, S. (2008). Konflik Tanah di Indonesia. *Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- PP. No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.
- Ramadhan, M. F. S., & Wahyudi, T. H. (2016). PEMBIARAN PADA POTENSI KONFLIK DAN KONTESASI SEMU PEMILUKADA KOTA BLITAR: ANALISIS INSTITUSIONALISME PILIHAN RASIONAL. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 143-162.
- Septyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Lutfi, M. (2016). Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Suhendar, E., & Kasim, I. (1996). *Tanah sebagai komoditas: kajian kritis atas kebijakan pertanahan Orde Baru*. ELSAM.
- Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 60-70.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUDUGSIDOREJO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1-17.
- Widodo, I. (2017). DANA DESA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI FISKAL. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 66-86.
- Winardi. 2007. Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan). Bandung: CV. Manjar Maju.